



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 14
MASA SIDANG II
TAHUN 2020

TENTANG

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
USULAN BUPATI DEMAK

DEMAK, 11 JUNI 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 14 (empat belas)
Masa Sidang : II
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Selasa / 11 Juni
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
 Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
 (Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi:
1. HM. Natsir
 (Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
 (Wakil Bupati Demak)
3. Zayinul Fata, SE
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
4. Maskuri, S.Ag
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
5. Nur wahid, S.H.I
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
 TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
36 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
 (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
 (Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
 (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-14
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA USULAN
BUPATI DEMAK**

Demak, Kamis 11 Juni 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang II (kedua) tahun 2020 dengan acara *Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu :*

1. *Raperda tentang Pertanggung
Pelaksanaan APBD Kabupaten
Tahun Anggaran 2019;*
2. *Raperda tentang Rencana Pe
Industri Kabupaten Demak Ta
2040;*
3. *Raperda tentang Sistem Pe
Berbasis Elektronik;*

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 Juni
nyatakan dibuka dan bersifat tert
umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berb

Setelah diserahkan 3 (tiga) Rap
Bupati Demak kepada DPRD Kabupa
pada rapat paripurna tanggal 8 Juni
sesuai dengan agenda yang telah
dalam Surat Keputusan Badan Musyaw

Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2020, pada hari ini Kamis, tanggal 11 Juni 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang perlu mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Saudara Bupati Demak berkaitan dengan Raperda dimaksud.

Untuk itu kesempatan **Pertama** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi **PDI Perjuangan** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI P :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Perjuangan yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Kedua** kepada Juru **PKB** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB :

Membacakan Pandangan Umum (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi **Gerindra** yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya pada Kesempatan **Ketiga** kepada Juru Bicara Fraksi **Gerindra** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA :

Membacakan Pandangan umum Fraksi (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi **Gerindra** atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keempat** kepada Juru Bicara Fraksi **GOLKAR** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi GOLKAR (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi **GOLKAR** atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Kelima** kepada Juru Bicara Fraksi **NASDEM** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi NASDEM (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi **NASDEM** atas Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keenam** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi **PPP** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PPP (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi **PPP** atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan yang **Ketujuh** diberikan kepada Juru Bicara Fraksi **Amanat Demokrasi** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT DEMOKRASI :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi Amanat Demokrasi (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi **Amanat Demokrasi** atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

PIMPINAN RAPAT :

Demikianlah tadi 7 (tujuh) Fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan, semoga menjadi sumbang-saran dan pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian berkaitan dengan pembahasan 3 (tiga) Raperda tersebut.

Untuk itu DPRD mengharapkan kepada Yth. Saudara Bupati Demak untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari ini. Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak, Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2020.

Rapat DPRD dan hadirin yang ber

Sebelum rapat paripurna Kami diumumkan Pergantian Anggota Badan Perwakilan Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 089/F.PDIP-Dmk/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Rekomendasi Pergantian Anggota DPRD Kabupaten Demak, Selanjutnya akan dibacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rekomendasi atas Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan dan Anggota Badan Musyawarah Dewa Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD.

Kepada Sekretariat DPRD dipersilakan

SEKRETARIAT DPRD :

Membacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rekomendasi atas Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan

dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaanya.

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah-
robbil'alamiin Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang II (kedua) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya
Wallahul muwaffiq ila aqwami
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi
Demak, Kamis 11 Juni 2020

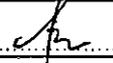
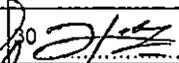
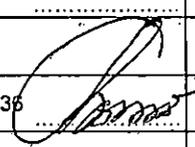
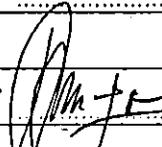
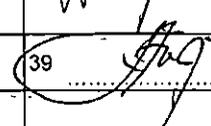
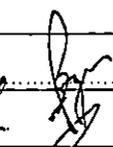
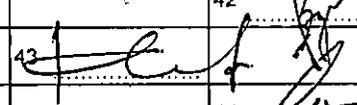
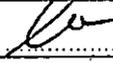
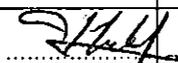
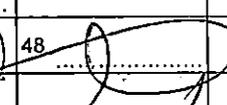
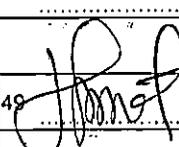
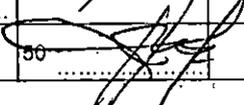
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : KAMIS
TANGGAL : 11 JUNI 2020
PUKUL : 09.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
USULAN BUPATI DEMAK

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR			
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	

26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT

Nomor : 005/0631
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak.

Di.-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat kehadiran Saudara besok pada :

- Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juni 2020
Waktu : Pukul 09.30 WIB
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir)
Acara : 1. Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan Acara Pandangan Umum Bupati Demak atas 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kab. Demak;
2. Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan Acara Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak
Pakaian : P S H (Pakaian Sipil Harian).
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Kode 891 7578 6242. Topic rapat paripurna ke 13,14 dprd demak masa sidang II th 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

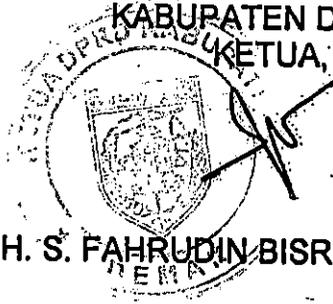
Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;

2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Kode 891 7578 6242. Topic rapat paripurna ke 13,14 dprd demak masa sidang II th 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

NO.	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Demak2. Bupati Demak3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak4. Wakil Bupati Demak5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak7. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak8. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak9. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak10. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak11. Kepala Dinnakerin Kabupaten Demak12. Kepala Dinkominfo Kabupaten Demak13. Kepala Dinpermades P2Kb Kabupaten Demak14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none">1. Forkompimda Kabupaten Demak2. Para Staf Ahli Bupati Demak3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Demak5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 dan 29 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KEL
1	2	3	4
1.	Kamis dan Jum'at 28 dan 29 Mei 2020	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak	
2.	Jum'at 29 Mei 2020	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah terkait Penanganan Covid-19	
3.	Selasa s/d Jum'at 2 s/d 5 Juni 2020 (Pagi)	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah terkait Penanganan Covid-19 dan Tupoksi Komisi (setelah Kunker bisa melaksanakan rapat dan mengundang Perangkat Daerah)	
4.	Selasa s/d Jum'at 2 s/d 5 Juni 2020 (Siang)	Rapat Bapemperda dengan Bagian Hukum Setda Demak terkait pembahasan : 1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin (Inisiatif) 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Inisiatif) 3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak (Inisiatif) 4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040 5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

	Senin s/d Minggu 6 s/d 7 Juni 2020	Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD dan Bapemperda	
7.	Senin 8 Juni 2020	<p>a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak</p> <p>b. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak</p> <p>c. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019</p>	
8.	Selasa s/d Rabu 9 s/d 10 Juni 2020	<p>Rapat Fraksi - fraksi membahas 6 (enam) Raperda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, 3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak, 4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040, 5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 6. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 	
9.	Kamis 11 Juni 2020	<p>a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak</p> <p>b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak</p>	

bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus A, B, C dan D membahas hasil Fasilitasi Raperda :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak;
 5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
- b. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara
- c. Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda

		<p>Pelaksanaan APBD Kab. Demak Tahun 2019</p> <p>- Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040</p> <p>- Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>b. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak</p> <p><i>dilanjutkan</i> Pengumuman Susunan Panitia Khusus</p>	
13.	Rabu dan Kamis 17 dan 18 Juni 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
14.	Jum'at s/d Selasa 19 s/d 23 Juni 2020	Rapat Komisi - komisi membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
15.	Rabu 24 Juni 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
16.	Jum'at 26 Juni 2020	<p>a. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019</p> <p>b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses DPRD Masa Sidang I Tahun 2020 (Internal)</p>	

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak, perlu merubah struktur Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 089/F.PDIP-Dmk/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Rekomendasi Pergantian Anggota BANMUS DPRD Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juni 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET⁴
R.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

- Ketua merangkap anggota : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.
- Wakil Ketua merangkap anggota : Zayinul Fata, SE.
- Wakil Ketua merangkap anggota : H. Maskuri, S.Ag.
- Wakil Ketua merangkap anggota : Nur Wahid, SH.I.
- Anggota : 1. H. Busro, S.Pd
2. H. Sonhaji, SH.
3. H. Sudarno, S.Sos.
4. H. Sugiharno, SP.
5. Hanna Maharani Layinnatus Syifa, SE.
6. Sukarmin
7. H. Nur Susaktiyo
8. H. Isa Ansori, ST.
9. H. Jayadi
10. Ahmad Mansur, SE.
11. H. Danang Saputro, SH.
12. Robert Frendy Kurniawan
13. Ristiko Arda Nari
14. Gunawan, A.Md.
15. Siti Khoiriyah, SE.
16. Martono
17. H. Abu Said, S.Pd.I.
18. Subari
19. H. Romain
20. Fatkhan, SH.
21. Sri Rejeki
- Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



42.



PDI PERJUANGAN

TENTANG

- 1. RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040**
- 2. RANCANGAN PERDA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
DEMAK, 11 JUNI 2020**

1. RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040
2. RANCANGAN PERDA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka !!!

Yang kami hormati. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Yang terhormat Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Unsur FORKOMPINDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan;

Yth. Sdr. Asisten Sekda, Kepala Bagian, OPD / Instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak;

Serta tamu Undangan dan Teman-teman Wartawan yang berbahagia.

Hadirin Peserta Rapat yang kami hormati;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap (1). Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040. (2). Rancangan Perda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Demak pada tanggal 8 Juni 2020.

yang naras kita teladani ajaran-ajarannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat. .Amien Yaa Robal'alam.

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum tentang (1).Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040. (2). Rancangan Perda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perkenankan kami mengucapkan:

1. Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2020. Pancasila lahir sebagai perekat kebhinekaan Indonesia, Kelima sila merupakan tuntunan yang wajib kita yakini, pelajari, dan contohkan kepada anak-anak kita agar kelak mereka paham arti tenggang rasa dan saling menghormati yang telah menjadi budaya asli Indonesia. Dengan demikian harapannya Pancasila dapat semakin membumi sebagai nafas filosofis kehidupan selaras dengan pesan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, bahwa Pancasila adalah media pemersatu untuk menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan bersama bagi bangsa Indonesia dengan keanekaragaman budayanya
2. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Demak ikut merasakan prihatin dengan adanya wabah covid-19 ini, tapi dibalik musibah tentunya ada berkah terutama dari segi penanganan pandemi Covid-19:
 - a) Nilai persatuan. Hal ini diwujudkan dalam kolaborasi yang cukup solid dari sisi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19. Manajemen penanganan Covid-19 juga cukup efektif dilaksanakan dari pusat sampai ke daerah.
 - b) Nilai kemanusiaan. Nilai ini terlihat dari solidaritas sosial seluruh elemen masyarakat yang bahu membahu untuk membantu pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 maupun membantu sesama saudara sebangsa yang terdampak pandemi Covid-19.

Juga memikirkan bagaimana roda perekonomian berjalan kembali sehingga kehidupan sosial-ekonomi bisa berangsur pulih kembali

3. "Tidak ada kata seindah kata maaf, tidak ada perbuatan seindah yang memaafkan, Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada kata maaf". Karena masih dalam suasana lebaran,. Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan kabupaten Demak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H. *Minal Aidzin wal Faidzin* Mohon Maaf Lahir & Bathin.

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Sebelumnya, ingin kami sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi upaya eksekutif dalam mengajukan 1. . Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040. 2. Rancangan Perda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk mewujudkan rancangan yang benar-benar sesuai tujuan bersama, diperlukan masukan dari berbagai pihak agar nantinya menjadi kesepakatan bersama guna meraih hasil yang benar-benar dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 di atas, sebagai upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengikuti perkembangan jaman.

Penggunaan sistem berbasis elektronik menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Karena pada saat ini masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses apapun melalui internet.

Setelah dipelajari dan dianalisis, selanjutnya menjadi tugas Fraksi PDI Perjuangan untuk menilai dan mengkritisi 2 (dua) Rancangan Peraturan

Dari beberapa pasal dalam Raperda tersebut, selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan menilai, ada beberapa cacatan, kajian dan analisis atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020. . Upaya ini kami lakukan sebagai masukan dan pertimbangan demi mewujudkan Kabupaten Demak yang siap dengan masa industrialisasi dan era teknologi informasi yang benar-benar membawa kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya agar secara bersama-sama membangun Kabupaten Demak, diperlukan pemikiran dan kajian yang mendalam akan dampak positif dan negatif dengan diberlakukannya Raperda tersebut.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan sudah seyogyanya memberikan masukan, catatan maupun pertanyaan sebagai berikut :

**RAPERDA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK**

1. Terkait dengan *Visi : industri berbasis sumber daya alam yang tangguh, berdayasaing, berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Pada Misi point (4) Meningkatkan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.*

Pandangan Fraksi PDIP, mendorong Industri yang berbasis padat karya dengan memanfaatkan dan mengutamakan sumber daya daerah serta kearifan lokal (*local wisdom*), bukannya industri yang hanya berbasis teknologi dan hanya mengacu pada profit dan dengan dalih peningkatan PAD semata, namun demikian perlu memperhatikan dampak bagi masyarakat sekitar dan generasi yang akan datang.

2. Bahwa terkait rencana untuk pembangunan kawasan industri harus tetap memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*) bahwa Kabupaten Demak merupakan kabupaten penyangga pangan ditingkat Provinsi maupun Nasional, maka semestinya industri yang ada harus mendukung untuk kemajuan pertanian yang berkelanjutan dan tetap sesuai dengan Regulasi Pembangunan Kawasan Industri yang ada.
3. Fraksi PDIP mendorong Pembangunan Kawasan Industri tidak melanggar tata ruang wilayah yang sudah di tentukan, maka dari itu ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan :

- kawasan industri baru tidak akan mematicakan usaha dan industri perumahan masyarakat sekitar, mohon dijelaskan!
- c. Apakah sudah ada kajian dampak yang terjadi adanya kawasan industri yang berdiri saat ini, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pembangunan kawasan industri yang akan datang ?
 - d. Mohon dijelaskan landasan maupun dampak filosofisnya bila Raperda Pembangunan Industri ini menjadi Perda !
4. Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengambil kebijakan maupun menentukan lokasi pembangunan Kawasan Industri agar tidak berdampak ROB, seperti yang ada di Kecamatan Sayung yang salah satu indikatornya adalah pembangunan Kawasan Industri yang kurang memperhatikan kearifan lokal sehingga beberapa desa yang ada di Kecamatan Sayung selalu menjadi langganan ROB. Dan terkait dengan permasalahan Rob, salah satu isu strategis di dalam RPJMD adalah mengatasi Rob. Fraksi PDI Perjuangan sangat prihatin terkait dengan adanya rob. Fraksi PDI Perjuangan berharap ada tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Demak terkait bencana rob ini, terutama di Kecamatan Sayung, agar mengambil langkah-langkah strategis dan nyata untuk jangka pendek maupun jangka panjang

RAPERDA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Demak mendorong :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, mempermudah akses koordinasi birokrasi, dan sinergitas antar pemangku kebijakan dengan stakeholder atau masyarakat, terutama dibidang administrasi Negara berdampak pada proses kerja pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisiensi, responsif tanpa proses yang berbelit-belit.
2. Untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mestinya pemerintah melalui dinas terkait sudah menyiapkan dan menjamin kesiapan sarana penunjang baik dari segi infrastruktur, anggaran, dan kesiapan SDM sampai di tingkat desa, agar semua data terintegrasi oleh satu sistem dan bisa diselesaikan dan berhenti ditingkat

- berbentuk hard copy sebagai perwujudan efektifitas dan efisiensi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Fraksi PDI perjuangan kabupaten Demak mendorong kepada pemerintah, dengan berlakunya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka sudah seharusnya DPRD dapat mengetahui secara detail dan realtime terkait pendapatan, penggunaan, maupun pengalokasian aliran dana daerah secara online.
 4. Mohon dijelaskan karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bersifat kompleks, dalam hal ini prioritas di bidang apa, yang akan dijadikan sebagai acuan Raperda ini?
 5. Terkait penerimaan Bantuan dampak Covid – 19 dan bantuan sosial lainnya, karena banyak terjadi kasus tumpang tindih data ditingkat desa, yang menyebabkan kesenjangan juga keresahan dimasyarakat, maka PDI Perjuangan Kabupaten Demak mendorong pemerintah melalui dinas terkait untuk mengkaji ulang, apakah program bantuan tersebut sudah layak dan patut diberikan serta perlunya pembaruan data ? Mohon ditindaklanjuti !

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Fraksi PDI perjuangan berharap semoga Raperda ini benar-benar menjadi produk hukum yang responsif, memenuhi keinginan, maupun kebutuhan masyarakat dan sebagai instrument untuk menuju masyarakat Demak lebih sejahtera.

Bunyi sila ke-2 Pancasila : “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” terkandung ajaran maupun nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ditengah pandemi ini, sila ke-2 mengajarkan agar masyarakat bersatu dalam melakukan perlawanan Corona dengan cara-cara yang cerdas. Sejak awal dikumandangkan oleh Bung Karno, Pancasila telah memiliki ajaran inti, yakni gotong royong. Dengan semangat Pancasila mari kita bahu membahu, gotong royong melawan Covid-19, mari kita bangkit dari situasi Pandemi Covid-19 ini untuk melompat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, badai pasti berlalu, begitu juga Covid-19 pasti berlalu !!!

Sebelum saya akhiri berikut kami sampaikan kutipan pidato Bung Karno 1 Juni 1945:

Royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia."

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amien. Terimakasih.

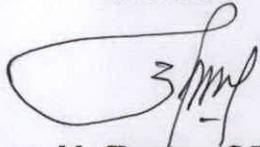
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Merdeka !!!

Demak, 11 Juni 2020

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Ketua



H. Busro, SPd

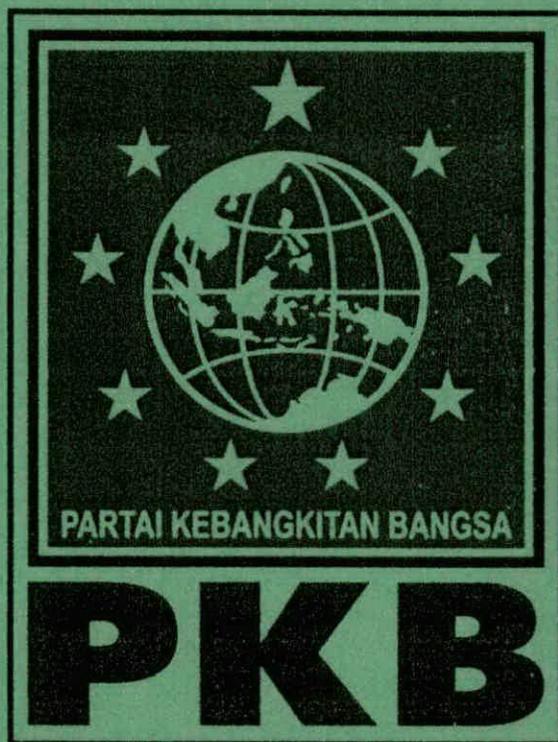


Sekretaris



Hanna Maharani Layinnatus Syifa SE

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
DPRD KABUPATEN DEMAK**



TERHADAP (2) RAPERDA

PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

Demak, 11 Juni 2020

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
DPRD KABUPATEN DEMAK



TERHADAP (2) RAPERDA

PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

Demak, 11 Juni 2020



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**

Assalamualaikum wr. wb.

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد:-

Kepada ;

Yang Terhormat. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yang Terhormat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak.

Yang kami Hormati. Saudara Unsur Muspida Kabupaten Demak

Yang kami Hormati. Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kab. Demak

Yang kami Hormati. Saudara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Demak

Yang kami Hormati. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak.

Yang kami Hormati. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

Yang kami Hormati. Saudara staf Ahli Bupati dan asisten sekda Kab. Demak.

Yang kami Hormati. Saudara FORKOPIMDA di lingkungan Pemerintahan Kab. Demak

Yang kami Hormati. Saudara FORKOPIMCAM se-Kabupaten Demak, dan

Yang kami Hormati. Para undangan dan teman insan pers yang berbahagia

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, marilah terlebih dahulu bersama-sama kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini masih dapat mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan Syafaatnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan sidang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, pada Sidang paripurna siang hari ini.

Selanjutnya Setelah kami baca nota Pengantar Bupati dalam rangka Penyerahan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dari hasil mencermati fakta di lapangan sehingga fraksi kebangkitan bangsa melalau hasil

rapat akhirnya di tuangkan di dalam Pemandangan umum sebagaimana akan kami sampaikan pada siang hari ini.

Yaitu mengenai,

- 1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040; dan**
- 2. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan tentang Raperda tersebut sebagai berikut :

- a. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040**

Sebagaimana amanat konstitusi upaya Pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai hal tersebut, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Demak, harus segera berupaya menyelesaikan dengan cermat, tepat dan cepat beberapa tantangan yang dihadapi dalam membangun kawasan industri. Tantangan itu mulai dari proses penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, kebutuhan infrastruktur,

pengelolaan dan pencarian *tenant*, hingga menciptakan kenyamanan berusaha.

Tantangan tersebut tentunya butuh langkah sinergi antara Kemenperindag dengan kementerian-kementerian dan lembaga terkait lainnya, yang secara khusus mengawal percepatan pembangunan kawasan-kawasan industri.

Misalnya, pada tantangan penyiapan dokumen perencanaan, Kemenperindag seyogyanya membantu menyusun pedoman dokumen perencanaan kawasan industri, baik berupa *masterplan*, *feasibility study* dan *detail engineering design*. “Kemenperindag juga melakukan pendampingan pada pemerintah daerah atau calon pengelola yang berniat menyusun dokumen perencanaan kawasan industri.

Selain itu, Kemenperindag selalu melakukan pendampingan dan supervisi penyelesaian permasalahan lahan dan tata ruang dengan pihak-pihak terkait baik lintas kementerian atau lembaga-lembaga lain.

Pembangunan sektor industri diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan Pemerintahan Demak, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Di lain pihak pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik berpengaruh pada pembangunan industri. Pembangunan ekonomi nasional itu merupakan sebuah sistem. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan sektor industri dalam jangka panjang bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan pada sektor industri saja, tetapi juga sekaligus harus mampu mengatasi permasalahan ekonomi di Kabupaten Demak. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya pertumbuhan ekonomi, terbatasnya infrastruktur, terjadinya ketimpangan pendapatan dan tingginya angka pengangguran serta kemiskinan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi tersebut merupakan

sebuah titik tolak dalam rangka mempercepat proses industrialisasi. Dalam konteks ini, pembangunan sektor industri memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas, di mana salah satu kebijakan tersebut adalah menarik investasi industri dengan menyediakan lokasi berupa kawasan industri. Kuncinya adalah **Decision maker** (faktor pengambil kebijakan). Dalam hal ini bertujuan menganalisis efek pengganda pembangunan kawasan industri terhadap pendapatan faktor produksi, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan sektor-sektor produksi lainnya serta menganalisis dampak kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap **output**, penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Demak. meningkatkan **output** perekonomian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada semua sektor, meningkatkan pendapatan pada semua golongan rumah tangga dan mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga bukan hanya sebagai **katalis** dan **fasilitator** tetapi juga menjadi **eksekutor** dalam hal pembangunan kawasan industri pada suatu wilayah sebagaimana di sebutkan Kecamatan Sayung. Khusus untuk wilayah **hinterland**, perlu dibangun proyek-proyek fisik yang mampu menciptakan keunggulan bersaing melalui pembangunan Sentra UMKM yang berbasis sumber daya lokal.

Masukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. pemerintah Daerah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana baik berupa infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang yang akan digunakan oleh perusahaan industri secara bersama-sama dan dikelola oleh suatu perusahaan yang memiliki izin usaha kawasan industri.

Sebagai contoh, Perusahaan-perusahaan di Zona Kecamatan Sayung ketersedianya kebutuhan air belum ada, sehingga Perusahaan membuat Sumur Bur sendiri yang berkapasitas

besar yang menggali air dari tanah (ABT) sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan akibatnya adanya penurunan tanah secara drastis, di samping itu izin penggunaan ABT yang berbelit bahkan sampai Polda, hal ini segera di tindak lanjuti ...

2. mengenai limbah Industri ini juga ancaman yang serius

Namun perlu kita ketahui bersama, bahwa semakin banyak industri maka akan semakin banyak pula bagi suatu Perusahaan Industri untuk mencemari lingkungannya. limbah ini tentunya tidak mempunyai manfaat sama sekali, bahkan keberadaannya harus ditangani dengan sangat serius. Limbah industri ini bisa berbentuk padat, cair maupun gas. Ketiga jenis limbah tersebut bisa mencemari tanah, air dan juga udara yang ada di dekat pemukiman Warga, Usaha perikanan, Pertanian dan lain-lain. Di harapkan Pemerintah Daerah Demak dengan sigap mensikapi hal tersebut...

b. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dasar hukum sistem tersebut adalah tertuang pada peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, SPBE merupakan singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang

berkualitas dan terpercaya. tata kelola dan manajemen sistem ruang lingkup SPBE meliputi rencana induk SPBE, Proses anggaran dan belanja serta data layanan pemerintahan berbasis elektronik serta diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE bukan hanya sekedar pengguna aplikasi atau sistem komunikasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain domain kegiatan pemerintahan, teknologi dan informasi serta layanan di dalam kegiatan pemerintahan. revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan Aparatur Negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau **e-government** yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK (Tehnologi, Informasi dan Komunikasi) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya membuat peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka **partisipatif, inovatif** dan **akuntabel** meningkatkan kolaborasi atau instansi pemerintahan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik

kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan upaya dan mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem ini.

Bersama ini dari Fraksi Partai KEBANGKITAN BANGSA MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPERSIAPKAN DAN MENJALAN KAN SISTEM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT;

1. Kebijakan internal terkait Team pengarah SPBE harus segera di tindak lanjuti dan di realisasikan dalam bentuk SK Tim.
2. Kebijakan internal terkait dengan inovasi proses bisnis (alur kerja terintegrasi) harus segera di rumuskan dan di realisasikan melalui koordinasi antar OPD-OPD terkait.
3. Kebijakan Internal terkait dengan integrasi sistem aplikasi perlu segera di buat dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang tertuang dalam RPJMD dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Demak.

4. Perlu penguatan tata kelola terkait dengan tim pengarah SPBE.
5. Perlu penguatan proses bisnis terkait dengan implementasi SPBE.
6. Perlu adanya koordinasi antara instansi di lingkungan pemerintahan Demak dengan bagian kominfo dalam hal pengembangan aplikasi sehingga tidak tumpang tindih.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia

Demikian Pemandangan umum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap 2 (Dua) Raperda telah kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dengan harapan masukan dari kami betul-betul di perhatikan dan dilaksanakan oleh Bupati sampai pada jajaranya demi cita-cita bersama.

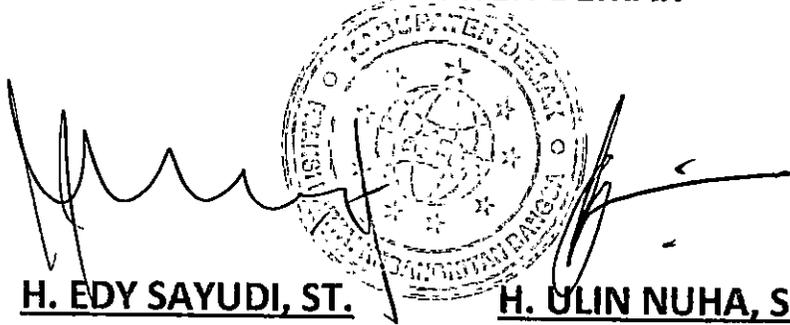
Akhirnya, dalam bulan Syawal ini, Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan Permohonan ma'af yang sebesar-besarnya bila ada Salah dan khilaf dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengemban amanat, semoga kita semua mendapatka peredikat Orang-orang yang bertaqwa serta semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan untuk mengemban amanah. Amien...

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Demak, 11 Juli 2020

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN DEMAK



H. EDY SAYUDI, ST.

H. ULIN NUHA, S.Pd.I

Ketua

Sekretaris



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN DEMAK**

TERHADAP:

**2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK USULAN BUPATI**

TENTANG:

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040.**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

Oleh:

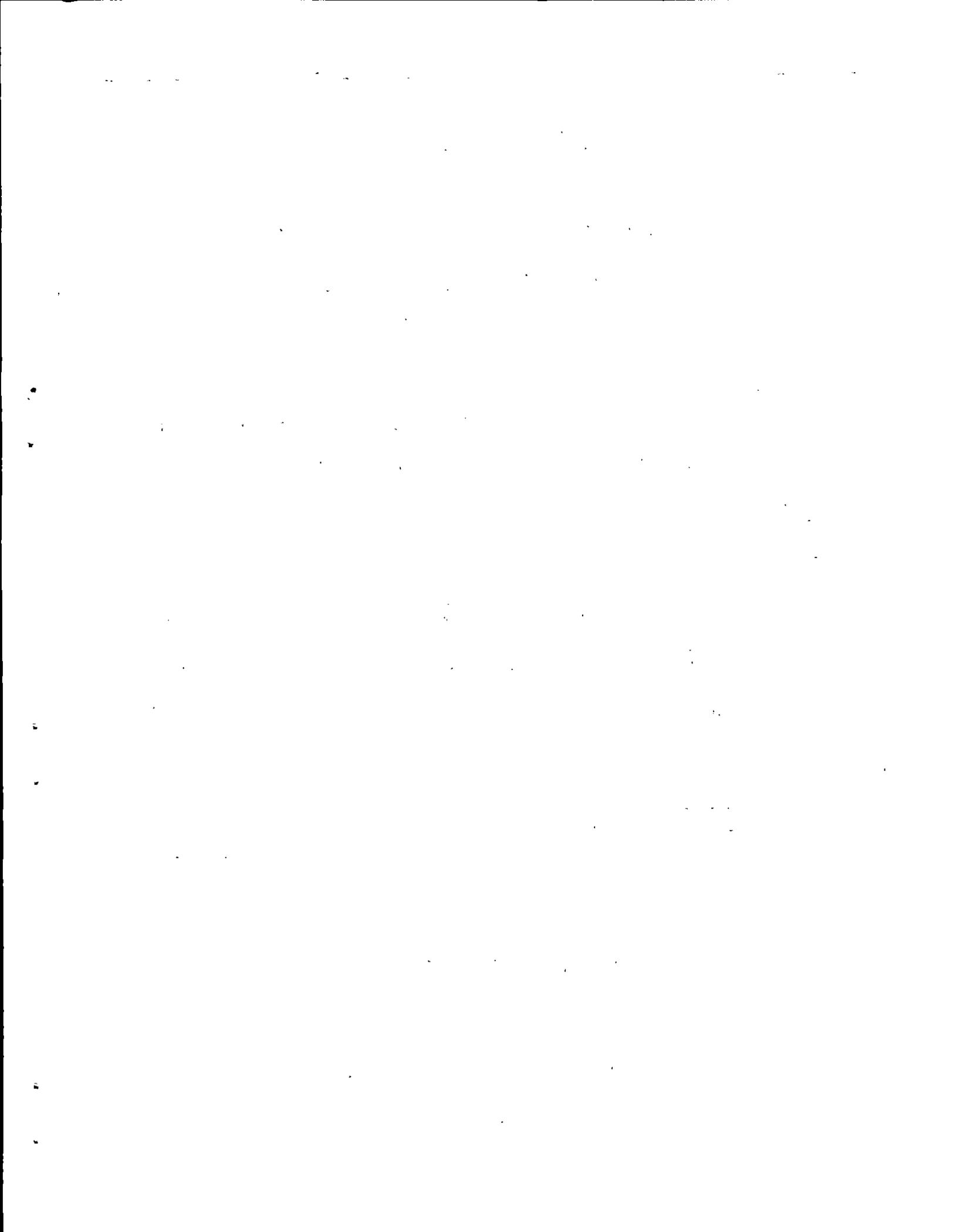
H. MUNTOHAR, S.H.

Disampaikan dalam Sidang Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Demak

Kamis, 11 Juni 2020



(GERINDRA)

DPRD KABUPATEN DEMAK

TERHADAP:

**2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK USULAN BUPATI**

TENTANG:

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2020-2040.**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TENTANG SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

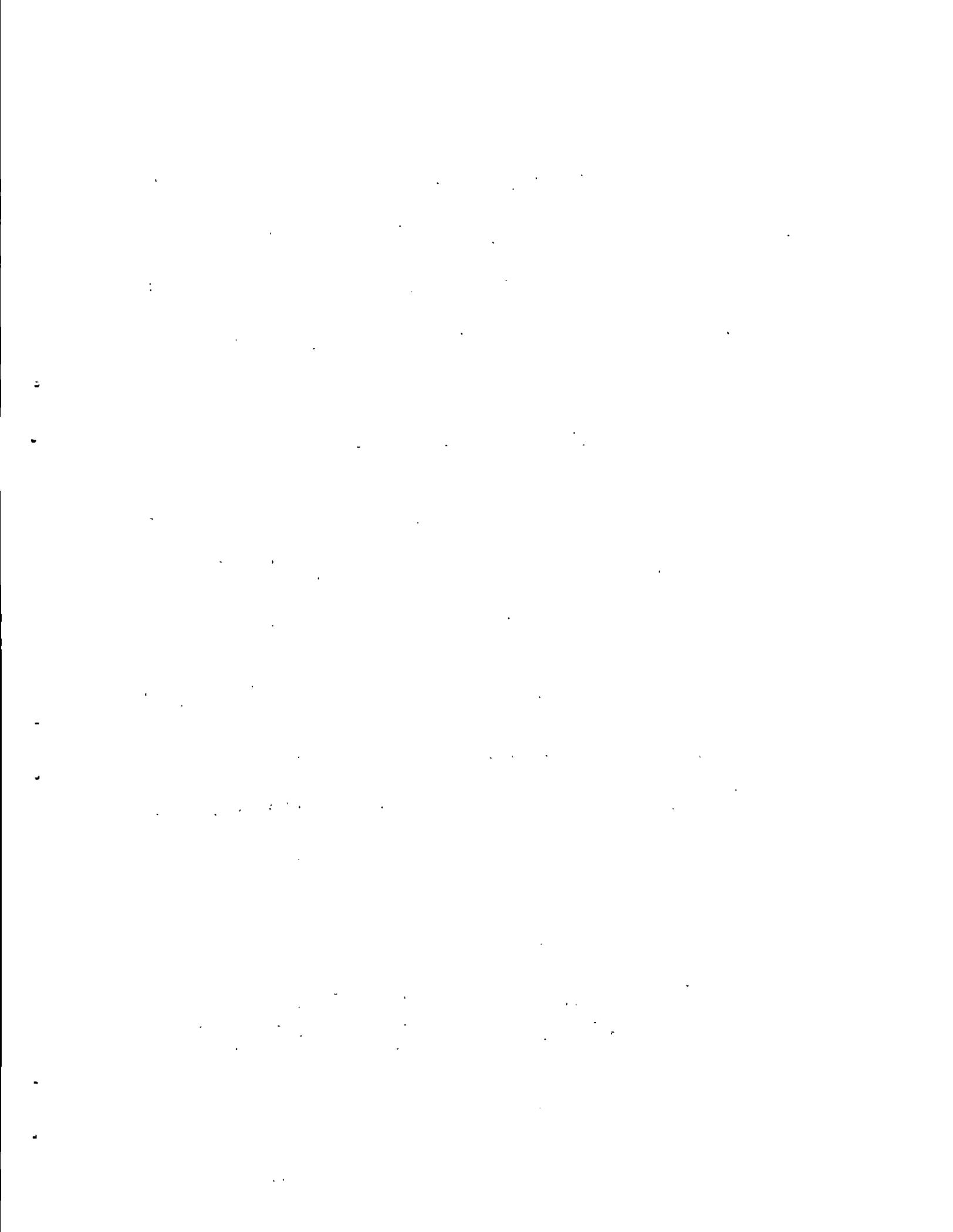
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Burung Merpati Burung Dara

Terbang Tinggi Ke Udara

Kami Kader Partai Gerindra

Mengucapkan Salam Indonesia Raya ... !



- 2. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Demak;**
- 3. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;**
- 4. Yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Demak;**
- 5. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;**
- 6. Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;**
- 7. Yang saya hormati Kepala Dinas, Badan, Bagian, Bidang, dan Seluruh Camat;**
- 8. Yang saya hormati Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian**

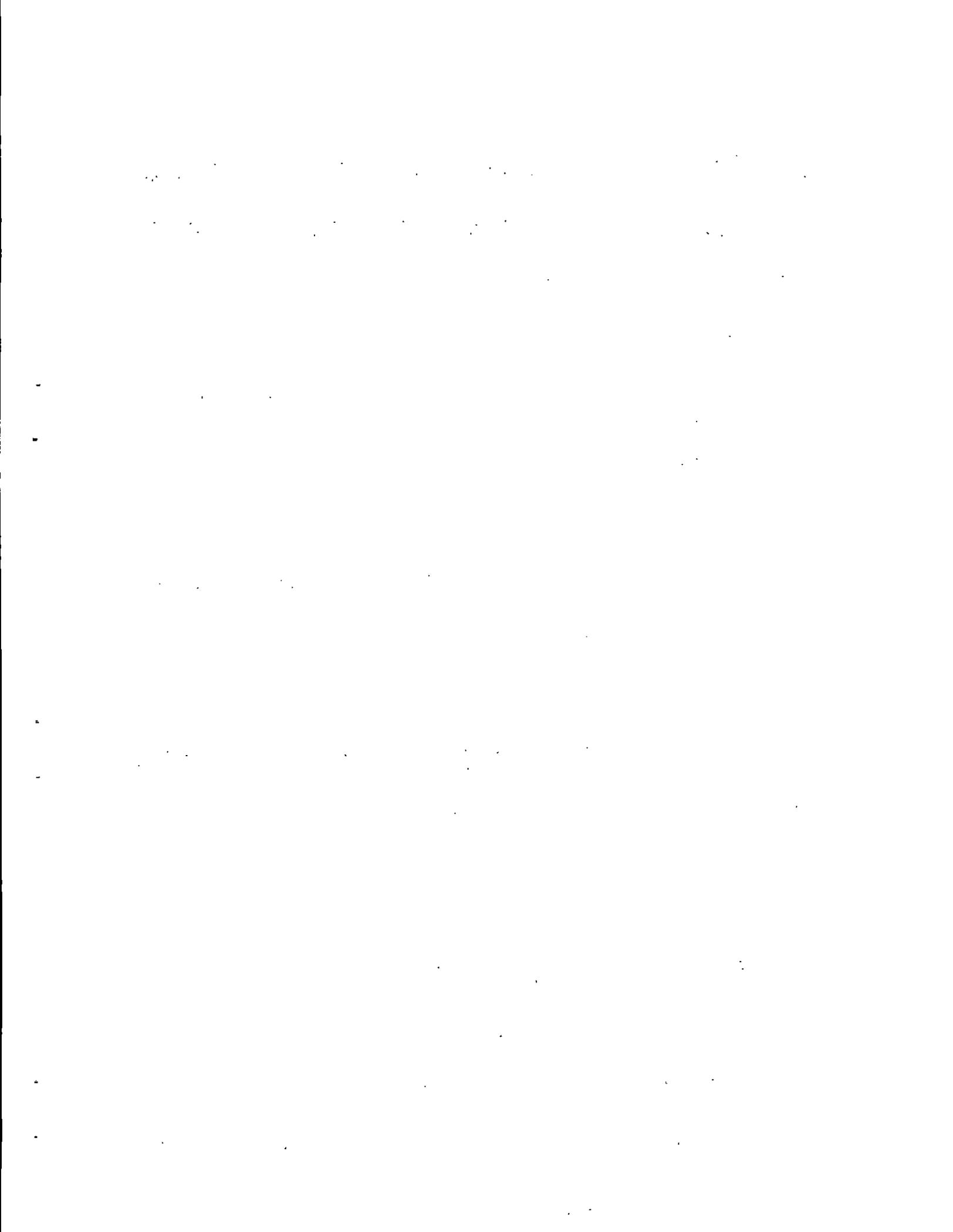
Alhamdulillah robbil alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan

Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda “Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Usulan Bupati”.

Selanjutnya, sholawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada jujungan kita beliau Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Sebelum menyapaikan pandangan umum ini, mengingat ini masih dalam suasana lebaran kami fraksi partai gerakan Indonesia Raya mengucapkan

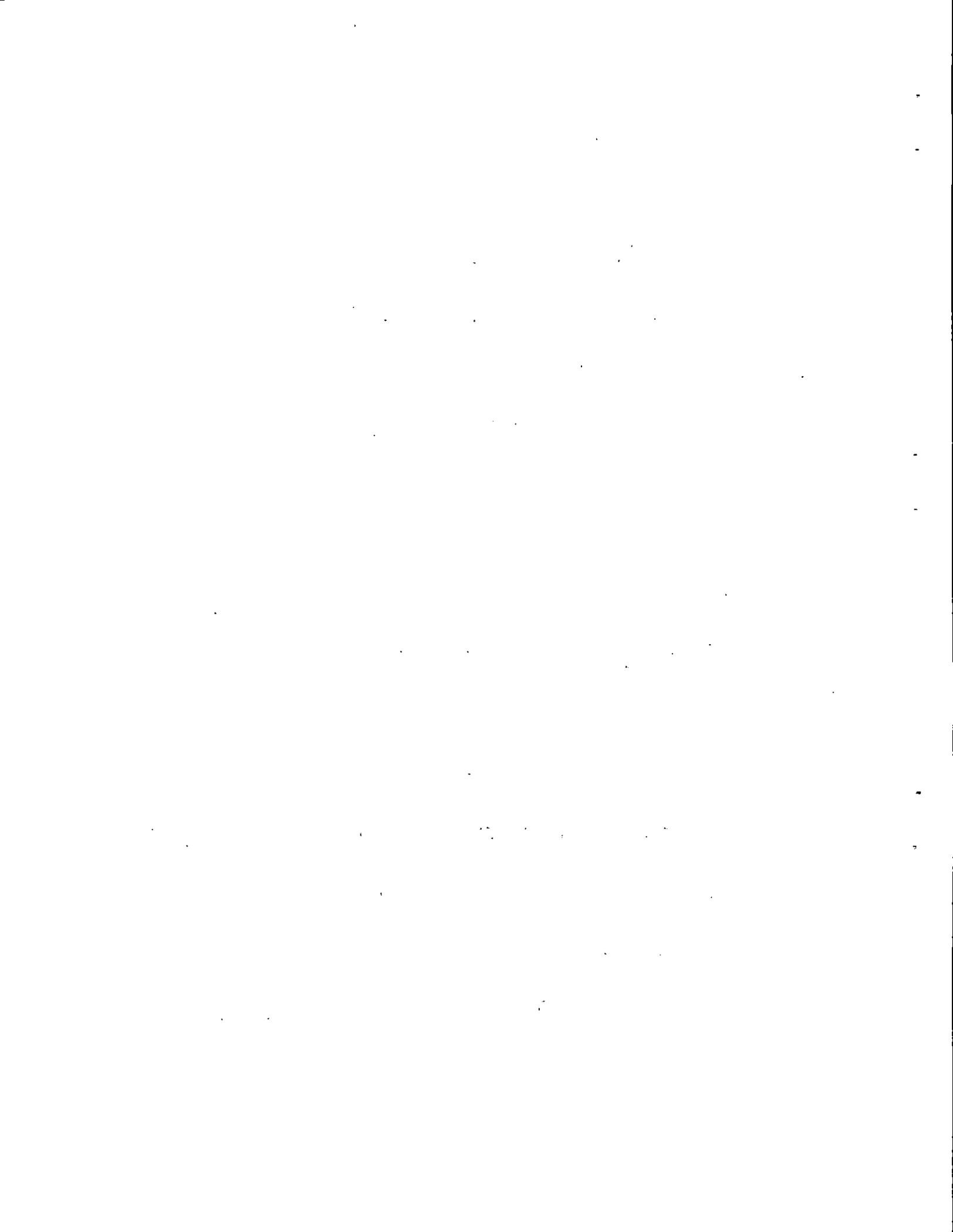


Selanjutnya kita juga barusaja kita memperingati hari lahir pancasila 1 juni 2020 semoga dengan peringatan hari lahir pancasila semangat pancasila selalu menyertai kita dalam setiap mengambil kebijakan-kebijakan yang ada .

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Gerakan indonesia raya untuk menyampaikan Pemandangan Umum fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Usulan Bupati.

Setelah melakukan rapat Fraksi Partai Gerakan indonesia raya, kami

- 1. Apa maksud dan tujuan rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) tahun 2020-2040 ?**
- 2. Sejauh mana manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar dengan adanya rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) tahun 2020-2040?**
- 3. Bagaimana status kepemilikan terhadap pembangunan industri kabupaten (RPIK) tahun 2020-2040 ?**
- 4. Apakah dengan adanya pembangunan industri disuatu daerah dapat menyerap tenaga kerja lokal ?. Disisi lain jika tenaga kerja yang dibutuhkan tidak mampu menunjang keberlangsungan**



- 5. Bagaimana ketegasan pemerintah daerah kabupaten Demak dalam memonitoring pelaku industri supaya tidak adanya kesenjangan antara industri kecil dan industri menengah ?**

- 6. Se jauh mana studi dampak negatif dan positif terhadap pembangunan industri di kabupaten demak ? mengingat demak sebagian besar kawasan dilalui garis pantai maka apakah berpengaruh besar terhadap keberlangsungan masyarakat pesisir ?**

- 7. Apakah dengan penggunaan lahan industri sangat berdampak terhadap berkurangnya lahan hijau ?, bagaimana mensikapinya ?**

sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) ?

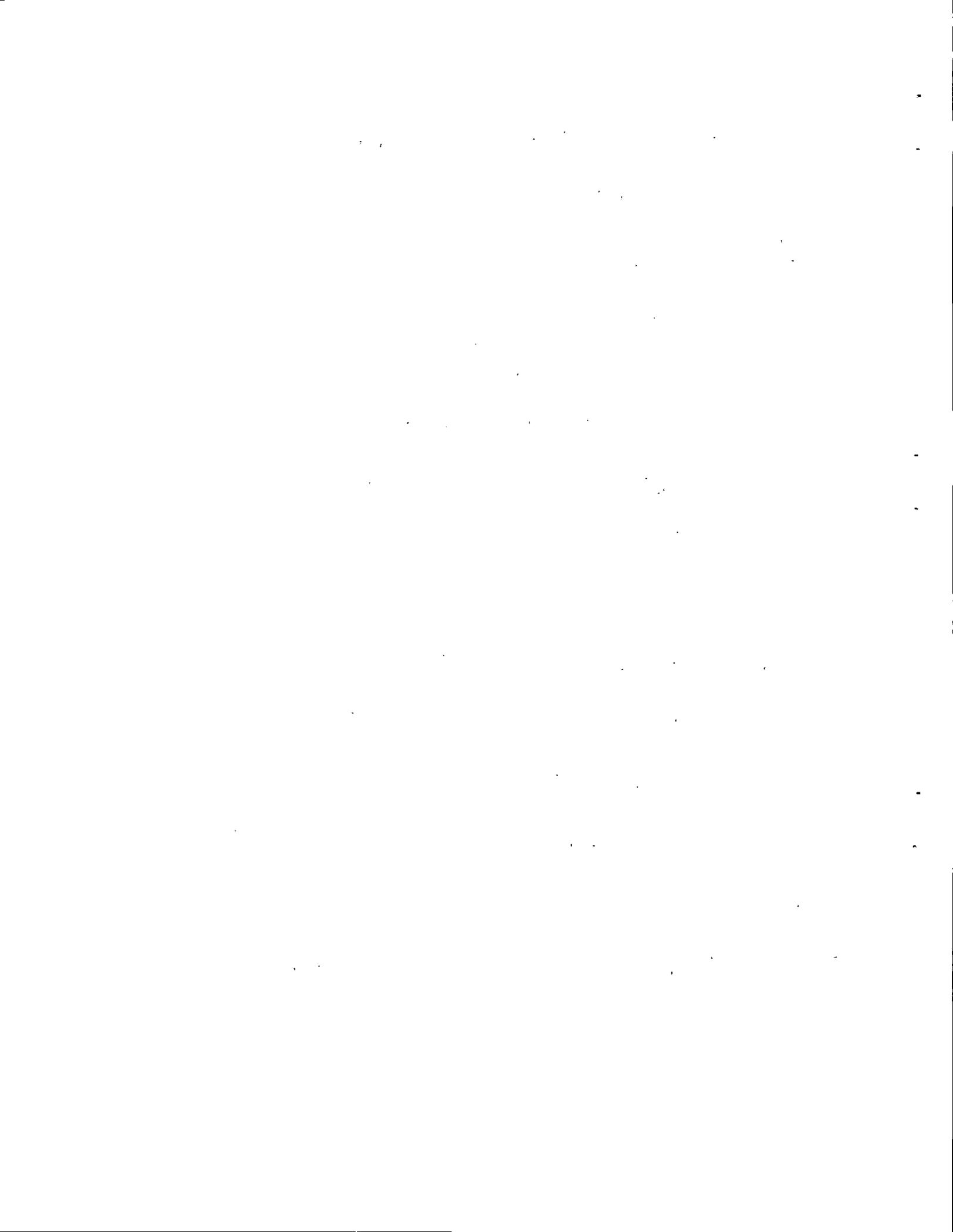
9. Apakah dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) SDM yang ada mampu dan siap untuk menggunakannya ?

10. Bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) ?

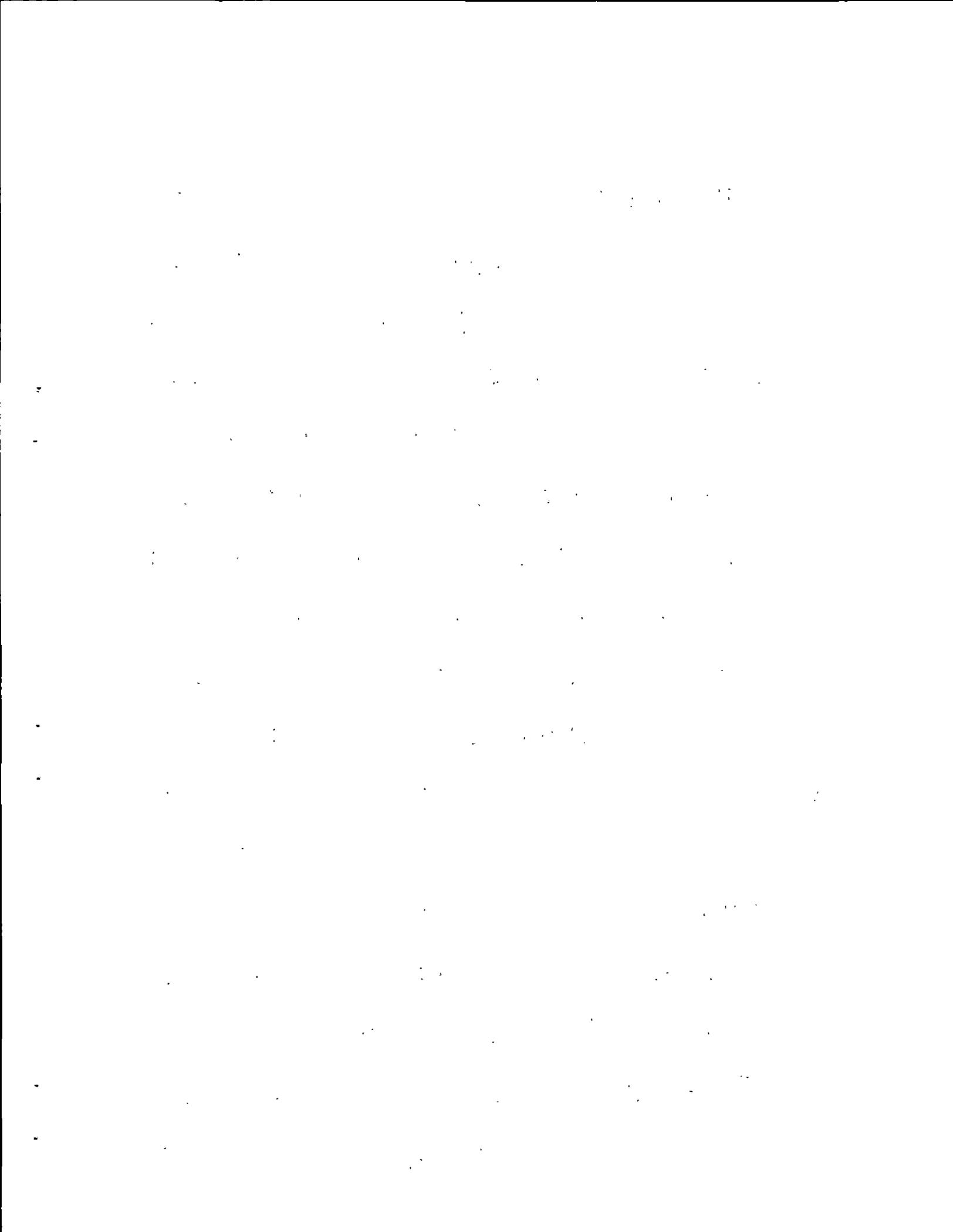
11. Bagaimana tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) jika nantinya diberlakukan ?

saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Setelah kami memaparkan serangkaian Pemandangan Umum, kami juga



- 1. Untuk menciptakan kawasan industri yang baik perlu dilakukan kajian yang mendalam sehingga masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan begitu juga diuntungkan akan adanya kebijakan tersebut .**
- 2. Dalam melaksanakan tata kelola rencana pembangunan industri kabupaten demak tahun 2020-2040 yang baik, diharapkan visi misi indonesia unggul mampu terwujud maka perlu ada pengawalan dan juga pengawasan langsung secara simultan.**
- 3. Seiring dengan perkembangan arus informasi yang begitu cepat serta perkembangan teknologi yang ada perlunnya sistem pemerintahan**



terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

4. Dimohon kepada saudara bupati untuk konsisten melaksanakan perda yang sudah menjadi ketetapan antara DPRD dan bupati, kemudian ditindaklanjuti dengan perbup.

Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Sebelum menutup pamandangan umum ini, fraksi partai Partai Gerakan Indonesia Raya berharap agar proses pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan peraturan daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat demak.

Kabupaten Demak, semoga masukan dan kritikan yang konstruktif yang telah disampaikan bermanfaat untuk membangun Kabupaten Demak yang lebih baik, semoga Allah SWT. selalu menyertai langkah kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarotuh

Demak, 11 Juni 2020

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Ketua



Sekretaris

Danang Saputro, S.H. Mu'thi Kholil, S.H.

Kabupaten Demak, semoga
kritikan yang konstruktif telah
dissampaikan bermanfaat untuk membangun
Kabupaten Demak yang lebih baik, semoga
Allah SWT selalu menyertai langkah kita.
Terima kasih atas perhatiannya, mohon
maaf atas segala kekurangan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrokatuh

Demak, 11 Juni 2020

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

(GERINDRA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

Sekretaris



Ketua

Gunang Saputro, S.H. Mu'thi Kholil, S.H.



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD
KABUPATEN DEMAK
TERHADAP**

- I. RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2020-2040**
- II. RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**
- III. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2019**

SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

DEMAK, 11 JUNI 2020

- REPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040
- II. RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 - III. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Sdr. Bupati, wakil Bupati,

Yth. Sdr. Ketua , Wakil Ketua , dan Seluruh Anggota Dewan,

Yth. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,

Yth. Sdr. Para Asisten dan Staf Ahli Bupati,

Yth. Sdr. Kepala Dinas, Badan,Instansi, Bagian, Sdr. Camat Se Kabupaten Demak, **Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT tentunya senantiasa kita panjatkan karena hanya oleh limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Pemandangan Umum terhadap 3 Raperda Kabupaten Demak Tahun 2020.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhamad SAW dengan harapan semoga kita tetap mendapat syafaatnya sampai di hari akhir.

Hadirin yang berbahagia,

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 3 Raperda kabupaten Demak Tahun 2020. perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1441 H . Mohon maaf lahir dan batin .semoga kita dipertemukan kembali ramadhan dan idulfitri tahun depan serta dimudahkan untuk melakukan kebaikan termasuk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Demak.

Sidang paripurna yang berbahagia,

Sebagaimana Nota pengantar Bupati dalam penyerahan 3 Raperda Kabupaten Demak Tahun 2020 telah disampaikan dalam rapat dewan tanggal 8 Juni 2020 yang lalu, kami perlu menyampaikan pendapat dan pandangan-pandangan demi penyempurnaan raperda yang dimaksud.” dan sebagai tambahan informasi dan gambaran secara umum dalam rangka pembahasan Raperda di tingkat Pansus, maka fraksi Partai Golkar mengajukan beberapa pandangan , pertanyaan , dan masukan – masukan. Adapun Pandangan – pandangan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Dalam Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak tahun 2020 -2040 .tidak termuatnya Ketentuan Umum ,yang mana ketentuan umum bagian dari batang tubuh dalam kerangka Peraturan Perundang-undangan.dan dalam UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah harus memuat sistematika ketentuan umum yang memuat pengertian atau Definisi yang berfungsi memberi batasan konsep ,menghindari konflik konsep dan menyelesaikan konflik konsep sehingga menjamin kepastian hukum. **Mohon Dikoreksi!**
2. Seberapa Jauh kesiapan Diskominfo untuk sarana dan Prasarana dalam menunjang penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)Termasuk kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) nya.**Mohon Penejelasan !**

4. Fraksi Partai Golkar Mencermati Adanya Problematika AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di kabupaten Demak ,terkait keberadaan industri yang masih tercecer diantara kawasan Pemukiman padat Penduduk.Oleh karena itu sector industry merupakan sector yang semakin pesat perkembangannya dimana kontribusinya menempati urutan pertama dalam penyusunan pajak daerah dan retribusi daerah dikabupaten Demak. **Mohon Penjelasan !**
5. Fraksi Partai Golkar Menilai Dalam ProseS Pembentukan Raperda Usulan Bupati ,kurang terkodinasikan antara OPD Pengampu dengan OPD terkait Raperda.karena kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi baik dalam perencanaan maupun pengayaan materi yang tertuang dalam raperda dan bahkan sampai dengan Raperda berlaku sehingga banyak Perda yang kurang dipahami dan kurang di implemantasikan oleh beberapa Stakeholder terkait Perda.**Mohon koreksi !**
6. Terkait Adanya NA yang belum siap saat akan diserahkan dalam parpirna maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Propemperda yang diusulkan untuk menjadi raperda yang akan dikirim ke DPRD ,agar diprioritaskan yang NA nya sudah siap.Supaya dalam rangka mengkaji dan merumuskan arah perda yang kita susun memiliki dasar akademik yang koherensif dan utuh ,Dengan harapan perda Kita menjadi Perda yang benar bermanfaat untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Demak. **Mohon Koreksi!**

Demak Tahun 2020 . Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan Demak tercinta.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Demak, 11 Juni 2020

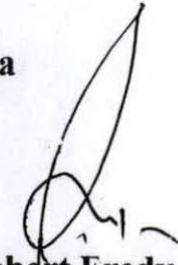
Fraksi Partai Golongan Karya

DPRD Kab. Demak


Hermin Widyawati,S.Pd

Ketua




Robert Fredy Kurniawan.

Sekretaris



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

TERHADAP.

- 1. RAPERDA Kabupaten Demak Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak TA 2019**
- 2. RAPERDA Kabupaten Demak Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2040**
- 3. RAPERDA Kabupaten Demak Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Demak, Kamis 11 Juni 2020

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK**

Bismillaahirrahmanirrohim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yang saya hormati Saudara Ketua dan para Wakil Ketua, beserta segenap para Anggota Dewan.

Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan sekretaris DPRD Kab. Demak

Yang saya hormati Para staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Demak

Yang saya hormati Saudara Forkompimda Kab. Demak.

Yang saya hormati Para Kepala Perangkat Daerah, Kantor, dan Camat se - Kab. Demak

Yang saya hormati rekan - rekan wartawan dan para tamu undangan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan segala nikmatNya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan aktifitas sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab dan semoga semua aktifitas kita tercatat sebagai ibadah kepada Allah SWT. Aamiin.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya.

Di bulan Syawal ini perkenankan kami Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak mengucapkan Taqobbalallahu Minna WaMinkum Waja'alana Minal A'idin Wal Faizin. Semoga Allah menerima amalan kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H. Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Fraksi Partai NasDem juga mengucapkan selamat Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.

DPRD, evaluasi APBD oleh Gubernur, penetapan, dan pelaksanaan APBD. Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi Daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program - program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah.

Guna mewujudkan seluruh keinginan bersama tersebut, serta untuk melaksanakan program kegiatan tentunya dalam fungsi Dewan sebagai Lembaga Legislasi, Budgeting dan Pengawasan menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita - cita bersama, sehingga mitra lembaga daerah dapat berjalan seiring seirama secara wajar dan proporsional.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Demak tanggal 8 Juni 2020. Fraksi Partai NasDem memandang telah banyak capaian hasil kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah pusat terutama dengan penilaian tentang laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Tentunya atas dasar laporan tersebut, maka kami Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak mengucapkan selamat atas keberhasilannya dan memberikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh OPD baik secara

Berkaitan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 tentunya Fraksi Partai NasDem yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya Pemerintah Daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa laporan tersebut diatas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami, hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali.

Namun DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan Pemerintah dengan maksud kedepan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurang sempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal dikemudian hari.

Tanggapan dan catatan-catatan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak semata - mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama, sehingga Fraksi Partai NasDem tetap konsisten untuk meluangkan waktunya mencermati Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 disampingkami juga menerima masukan - masukan dari pemerhati dan masyarakat. Kemudian dari rangkuman pendapat tersebut kami jadikan sebagai catatan strategis, dengan harapan dikemudian hari pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Pembahasan ini terkorelasi dengan waktu perencanaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan serta peran dari partisipasi masyarakat dalam menilai hasil kerja kita bersama.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

Setelah Fraksi Partai NasDem melakukan kajian terhadap 3 Raperda tersebut, maka dirasa perlu Fraksi Partai NasDem menyampaikan beberapa pemikiran dan pandangan serta pertanyaan untuk mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari saudara Bupati guna proses pembahasan lebih lanjut diantaranya sebagai berikut :

1. Fraksi Partai NasDem sangat mengapresiasi atas pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak TA 2019 oleh BPK RI.
2. Fraksi Partai NasDem berharap pemerintah daerah mampu berlaku bijak dalam menggunakan anggaran yang ada dan semakin giat kembali untuk mampu meningkatkan PAD dengan melakukan terobosan - terobosan yang lebih efektif dan efisien. Salah satu asset tetap milik daerah yang sering mengalami permasalahan atau temuan adalah asset tetap tanah. Mohon penjelasan terkait berapa luas bidang tanah milik pemerintah daerah yang masih belum memiliki sertifikat sampai hari ini dan sekaligus berapa nilai keseluruhannya?
3. Terkait realisasi PAD TA 2019 sebesar Rp.407.400.540.994,55 (*Empat Ratus Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Lima Puluh Lima Rupiah*). dari rencana Anggaran sebesar Rp.377.428.524.462,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*). atau 107,94 % naik 7,94%.Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 342.324.870.245,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).maka realisasi tahun 2019 meningkat sebesar Rp 65.075.670.749,55 (*Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Lima Rupiah*). atau ada kenaikan 19,01%.Menurut pandangan Fraksi Partai NasDem jika dilihat dari aspek perencanaan ada ketidakcermatan dalam menentukan

baik dalam proses penyusunan perencanaan. Tercapainya PAD sebesar 107,94% belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah, perlu kreatifitas program terpadu antar OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam rangka meningkatkan PAD secara signifikan. Fraksi Partai NasDem mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar - benar diangka yang moderat.

4. Fraksi Partai NasDem menyayangkan dan sekaligus mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan, hal itu didasarkan serapan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 yang kurang optimal. Sehingga SiLPA masih cukup tinggi. Terkait SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 225.039.224.475,55. (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Koma Lima Puluh Lima Rupiah*). Fraksi Partai NasDem mencermati bahwa SiLPA masih terlalu besar. Dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan. Ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi. Seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan hanya karena persoalan - persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu, dll. sehingga anggaran dikembalikan ke kas daerah. Selain itu, belanja daerah sebagian besar masih untuk belanja pegawai, komponen gaji dan tunjangan. Mohon penjelasan.

pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Demak.

6. Belanja hibah yang di rencanakan tahun 2019 sebesar Rp 85.408.506.000,- (*Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah*). Hanya terialisasi sebesar Rp 79.655.705.500,- (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*). kenapa dasar perumususan perencanaan kegiatan hibah di Tahun Anggaran 2019 tidak didasarkan pada pencapaian ditahun anggaran 2018?. Hibah yang peruntukannya langsung dapat dirasakan masyarakat seharusnya dari tahun ke tahun bisa bertambah luas dan juga anggarannya bias meningkat. Mohon penjelasan.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040.

UU nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian memiliki dasar pertimbangan bahwa pembangunan nasional bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh, pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada

Industri Daerah Kabupaten Demak tahun 2020-2040. Menurut Fraksi Partai NasDem sesuai amanat UU no 3 tahun 2014 tentang perindustrian, pembangunan industri daerah ini dipahami nantinya mencakup sasaran pembangunan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri, serta sarana dan prasarana industri. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional sampai 20 tahun ke depan, memiliki tujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Untuk bisa menuju pada tujuan tersebut, maka peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

2. Fraksi Partai NasDem memandang bahwa sebagaimana diketahui bersama, pembangunan erat kaitannya dengan kegiatan industri. Industri merupakan bagian dari usaha jangka panjang untuk meningkatkan struktur ekonomi yang tidak seimbang, dan diketahui bersama pula bahwa pembangunan industri ini, ditujukan untuk memperluas lapangan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam dan energi serta sumberdaya manusia.
3. Apakah dalam penyusunan Raperda tersebut sudah Sesuai dengan pasal 11 UU no 3 tahun 2014 setiap Bupati / Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan Industri Nasional. didalam ayat 3 yang berbunyi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan : potensi sumber

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik dinyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Fraksi Partai NasDem mengharapkan, pengelolaan pelayanan pemerintah melalui sistem elektronik atau E-Goverment dapat meningkatkan kenyamanan dalam memberikan pelayanan masyarakat. Aplikasi pelayanan hendaknya memiliki menu yang lengkap sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan dalam jaringan (online).
2. Untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat, maka diperlukan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. mohon penjelasan fasilitas apa saja yang akan disediakan oleh

nukun untuk pelaksanaan E-Government bertujuan agar semakin mempermudah pengelolaan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan sistem E-Government ini tidak hanya sekedar menyediakan website aplikasipelayanan tetapi harus menjadi fasilitas pengelolaan dan pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan akses. Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah juga beradaptasi menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan. E-Goverment sebagai wujud dari adaptasi itu yang tentunya Fraksi Partai NasDem mengharapkan mempercepat akses pengelolaan dan pelayanan. lebih jauh lagi, melalui E-Government akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. sistem ini akan menekan biaya operasional pemerintah daerah yang cukup signifikan serta mempercepat proses pengelolaan dan pelayanan.

4. Fraksi Partai NasDem juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi terkait pemanfaatan ruang cyber sebagai basis data pengelolaan. Sudah menjadi keniscayaan pemanfaatan teknologi untuk menghadapi masa depan global yang kompetitif untuk menghadirkan pelayanan maksimal kepada masyarakat, namun juga harus disiapkan langkah antisipasi terhadap kerugian yang mungkin akan terjadi atau timbul. Hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain langkah antisipasi terhadap kejahatan dunia maya atau cyber crime. semakin bebasnya akses masyarakat ke situs pemerintah daerah akan membuka peluang munculnya kejahatan yang merusak sistem teknologi E-Goverment.

Kabupaten Demak yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan mendapat perhatian, tanggapan dan jawaban sebagaimana mestinya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua

Aamiin ya Rabbal 'Alamin. Terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr,Wb.

NASDEM "BERSATU, BERJUANG, MENANG".

**FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Ketua

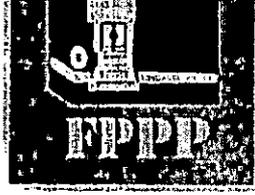


H.BUDHI ACHMADI,SE

Sekretaris



IBRAHIM SUYUTI,SH



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
3(TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

KAMIS, 11 JUNI TAHUN 2020

**3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG**

- 1. RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK
TA HUN 2020 - 2040**
- 2. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**
- 3. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamualaikum wr. wb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اِمَامِ الْاَنْبِیَا -
وَالْمُرْسَلِیْنَ , سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ , اَمَّا بَعْدُ :-

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan

Yth. Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Instansi, Bagian dan para Camat se- Kabupaten Demak.

Segenap Undangan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rohmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini, Kamis ,11 Juni 2020 kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 yaitu :

1. Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2040
2. Rancangan Perda tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Rancangan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019

menyampaikan kebenaran, menuju keselamatan Umat manusia di dunia dan diakhirat. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami, guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap 3 (tiga) Raperda Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

Sebelum memasuki materi pokok, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Ucapan yaitu : Selamat idul fitri ; kami mohon Maaf lahir batin Kepada Pemerintah Kabupaten Demak serta masyarakat Kabupaten Demak . Mohon maaf juga , Fraksi PPP DPRD Demak tidak bisa Silaturahmi ke panjenengan hal ini di samping belum sempat juga baru adanya musibah wabah penyakit sehingga silaturahmi kami terbatas sekali, dan kaitan wabah penyakit covid 19 ini di samping semua sudah berusaha yang terpenting lagi adalah berdoa memohon kepada Allah SWT. Semoga situasi dan

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati,

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan terhadap 3 (tiga) Raperda Tahun 2020 sebagai berikut : Untuk Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak yaitu :

1. Bahwa Pembangunan Industri di Kabupaten Demak harus memperhatikan keserasian ,keselarasan,kesinambungan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan baik nasional ,regional maupun internasional. Berkaitan dengan Raperda ini maka perlu mencermati lagi terhadap legal drafting raperda ini, terutama perlunya ada tambahan pasal mengenai ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Karena hal tersebut mengatur tentang

Penjelasan?

2. Visi Misi Pembangunan Industri Kabupaten Demak tahun 2020 – 2040 perlu mengacu kepada kebijakan Daerah, yaitu :

a. Perda Kabupaten Demak No. 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak (RPJMD) tahun 2016 – 2021. Dalam RPJMD tersaebut dituangkan Visi Pembangunan Kabupaten Demak Adalah : “ Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”.

Di dalam mewujudkan Visi tersebut maka Kabupaten Demak menetapkan 9 misi.

b. Perda Kabupaten Demak No. 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011 – 2031. Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Demak No. 1 tahun 2020, Kawasan Peruntukkan Industri Terdiri Atas Industri besar, Industri menengah dan Industri kecil dan / mikro

mikro diarahkan untuk mendukung potensi ekonomi local, meliputi : Hasil pertanian, makanan, kerajinan dan komoditas lainnya.

Dalam hal pengembangan perwilayahan Industri dilakukan melalui wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan untuk industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Dalam Raperda ini tidak dimuat detail wilayah pengembangannya, hanya di dalam nota pengantar Saudara Bupati menyebut wilayah Kecamatan Sayung sebagai wilayah yang strategis untuk industri. Hal ini perlu penjelasan secara rinci wilayah yang dimaksud, mohon penjelasan.?

3. Terkait pembangunan sarana dan prasarana sektor industri harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain meliputi infrastruktur / pengelolaan lingkungan, yang terdiri infrastruktur pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah udara, sehingga

tidak terjadi pencemaran lingkungan. Hal ini juga Pemerintah harus memaksimalkan kinerja OPD terkait juga peran lembaga uji. Mohon penjelasan?

4. Dalam hal ketenagakerjaan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Demak untuk tenaga kerja sektor industri sehingga rencana ke depan bisa banyak menyerap tenaga kerja terutama dari masyarakat Kabupaten Demak dan mempunyai SDM yang bersaing, untuk saat ini berapa data pengangguran atau pencari kerja di Kabupaten Demak. Mohon penjelasan?

Adapun saran, masukan, pendapat dan pertanyaan Fraksi PPP berkaitan dengan Raperda Kabupaten . Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Fraksi PPP sangat mendukung dengan pengajuan Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mana Pemerintah Kabupaten Demak saat ini sudah menggunakan infrastruktur SPBE di lingkungan perangkat Daerah walaupun belum

infrastrukturnya dan Pelatihan SDM nya bagaimana mengenai hal tersebut ,Mohon penjelasan ?

2. Dalam Rangka pencapaian tujuan pembangunan aparatur negara serta menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas di perlukan sebuah perangkat hukum yang memayungi segala urusan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE) di Kabupaten Demak,maka harapan Fraksi PPP Raperda ini bisa dibahas dengan baik oleh pansus DPRD dan pada realisasinya ke depan Pemerintah kabupaten Demak bisa menjalankan perencanaan dan implementasi dengan efektif dan Berkualitas,sehingga pemerintah, aparatur sipil negara,pelaku bisnis,masyarakat dan pihak pihak lainnya bisa mendapat layanan dengan baik dan membawa kemajuan kabupaten Demak.Bagaimana komitmen Pemerintah Kabupaten Demak terhadap hal ini mohon penjelasan ?

Demak Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kami memberikan Apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Demak atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

2. Realisasi Pendapatan APBD kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp.2.362.016.248.792,55

Adapun Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2019 realisasi belanja sebesar Rp.1.899.488.390.627,00 atau terealisasi sebesar 91,53% sehingga masih ada Silpa Sebesar Rp.225.039.224.475,55 . kenapa Silpa sebesar itu Mohon penjelasan ?

3. Penyerahan buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 agar segera dikirim LHP BPK nya.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati

terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, Kemudian untuk di tindak lanjuti dalam tahapan Rapat berikutnya. kemudian apabila ada kehilafan dan kesalahan mohon ma'af yang sebesar-besarnya, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih, semoga Demak semakin maju, aman, kondusif, bersih dan tertib dibawah lindungan Allah SWT, Aamiin.

Walloohul muwaafiq ilaa aqwamith thoriq

Wassalamualaikum wr. wb.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA

SEKRETARIS



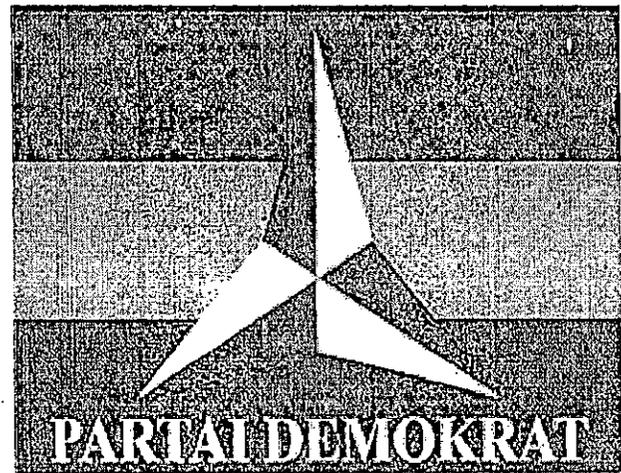
The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for H. Abusaid S.Pd.I, and the signature on the right is for Bangun Setyobudi Saputro, S.Sos. Between the two signatures is a purple official stamp. The stamp is oval-shaped with a double border. Inside the inner border, the text 'FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN' is written along the top curve, and 'KABUPATEN DEMAK' is written along the bottom curve. In the center of the stamp, the letters 'DPRD' are printed in a bold, sans-serif font, flanked by two small five-pointed stars.

H.ABUSAID S.Pd.I

BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO,S.Sos

TERHADAP

- ❖ RAPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
- ❖ RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 – 2040
- ❖ RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019



DEMAK, 11 JUNI 2020

- Yang kami hormati Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati FORKOMPINDA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili.
 - Yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, dan Instansi sekabupaten Demak
 - Yang kami hormati Camat sekabupaten Demak
 - Yang kami hormati Tamu undangan dan teman-teman mass media baik cetak maupun elektronika di Kab. Demak
- Mengawali pandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dimana sampai saat ini kita masih menerima Taufik dan Hidayah-NYA sehingga kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Pagi ini.
- Sholatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah dengan Ridha Allah besok akan memberi syafaat kepada kita semua, Amin.

- RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2020 – 2040
- RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

Ijinkan kami menyampaikan..

- Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Demak, Kodim 0716 Demak, dan Satpol PP Kabupaten Demak serta OPD terkait, yang dengan tegas melaksanakan penertiban dan pembongkaran terhadap tempat hiburan karaoke yang semakin hari semakin meresahkan warga Kabupaten Demak.

Selanjutnya kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah memberi waktu kepada Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi

Pimpinan Sidang,

Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

A. RAPERDA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PERTANYAAN

1. Di Pasal 13 Ayat 3 berbunyi : Sistem Penghubung layanan antar instansi Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b, merupakan perangkat integrasi perputaran layanan SPBE antar perangkat daerah dan antar perangkat daerah dengan instansi pusat.

Apakah pasal 13 ayat 3 ini akan mengganggu kegiatan studi banding, kunjungan kerja OPD dan Lembaga secara langsung?

Karena segala bentuk informasi sudah bisa diakses lewat SPBE. Mohon penjelasan!

B. RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 - 2040

1. Dalam pasal 1 ayat 2 huruf e Raperda Induk Pembangunan Industri,

berbunyi :

Pembangunan sarana dan prasarana industry.

Kenapa dalam consideran tidak memasukkan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2017 yang memuat tentang Pembangunan sarana dan prasarana industri.

Mohon penjelasan.

Kenapa didalam consideran tidak memasukkan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 yang mengatur tentang pengawasan pembinaan dan penyelenggaraan industri.

Mohon dijelaskan!

2. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten telah dibuat dengan *simple, padat dan berisi* (terdiri 8 pasal dan 8 ayat) yang juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung. Setelah kami membaca lampiran-lampiran pendukung ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. -

a. Di tabel 4.5, 4.8, 4.9, 5.12 semua program kerjanya hanya sampai tahun 2025, sedangkan di table 4.6, 4.7, programnya sampai tahun 2040. Kenapa ada perbedaan?

Mohon untuk dijelaskan.

b. Dilampiran pendukung nomer IV di bidang data pendukung Sumber Daya Industri,

Data pendukungnya itu produk tahun 2013.

Kenapa tidak menyajikan data tahun 2019?

Mohon dijelaskan.

c. Di lampiran pendukung No V tentang Pembangunan sarana dan prasarana, di tabel 2.7 perkembangan sarana dan prasarana menggunakan data tahun 2013. Dimana jumlah lahan untuk industri tetulis 1800 hektar. Kenapa ini terjadi? Karena Perda RT/RW Kab. Demak sudah ada perubahan 2 kali. Mohon Penjelasan

Mohon dijelaskan!

C. RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANANN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

1. Di lampiran aset tanah di masing-masing OPD tertulis angka
Rp. 1.236.391.353.384 yang berada di 76 OPD.

Nilai sebesar itu belum memasukkan RSUD Sultan Fatah.

Kenapa hal ini bias terjadi?

2. Saldo dana BOS tahun 2019 sebesar Rp. 4.822.154.632

Saldo ini bersumber dari kelebihan jumlah siswa atau adanya
pindahannya siswa.

Apakah akan tetap dialokasikan untuk BOS?

Sedangkan tahun ajaran baru 2020-2021 akan memperhitungkan
jumlah siswa yang baru

Mohon dijelaskan!

3. Piutang transfer Pusat dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber
Daya Alam dari tahun 2018 dan tahun 2019 sejumlah

Rp. 4.166.736.268.

Berdasarkan PMK No. 36/PMK.07/2020 akan digunakan untuk
penanganan covid-19.

Seberapa besarkah anggaran yang disediakan Pemkab untuk
penanganan covid-19 di Kabupaten Demak selain transfer Pusat

Mohon Penjelasan

Jawa Tengah) sebesar Rp. 5.413.572.045

Kenapa ini dimasukkan ke piutang?

Menurut asumsi kami bila sudah berganti tahun transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bisa cair.

Mohon penjelasan

Pimpinan Sidang,

Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

PERTANYAAN LAIN-LAIN

❖ Fenomena rob yang begitu besar menjadi problem baru sebagian besar masyarakat Demak, utamanya yang berdomosili di daerah pesisir.

Sehingga ini berdampak negatif pada sektor ekonomi dan juga sosiologis.

Upaya apa yang akan dilakukan Pemda dalam menangani rob yang sebagian besar orang menyebut ini merupakan musibah?

❖ Terkait jumlah orang yang positif covid-19, data yang disajikan oleh Pemda kurang valid.

Sebagai contoh, di Desa Kedungmutih orang yang positif covid-19 adalah 1 orang, dan saat ini sudah dalam penanganan tim medis, namun yang tertulis di data Pemkab terdapat 2 orang yang positif covid-19 tanpa diketahui siapa orangnya.

Mohon penjelasan.

Karena pasal 23 doble

Dari BAB VII ke BAB VIII pasalnya tidak nyambung, dari pasal 35 langsung ke pasal 39

Pimpinan Sidang,

Bupati dan Wakil Bupati yang berbahagia...

Kami Fraksi Amanat Demokrasi tidak bisa membuat Pandangan Umum secara maksimal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 karena belum menerima Buku LHP BPK tahun 2019

Demikian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Raperda.

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah

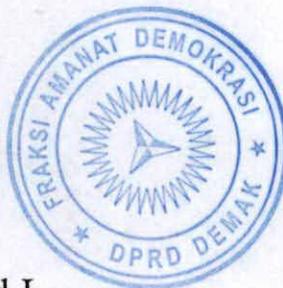
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 11 Juni 2020

Ketua



H. Farodli. S.Pd.I



Sekretaris



Fatkhan. SH